

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AB Massier & Marjanne Termorshuizen-Arts.2000, *Indonesische-Nederlands Woodenboek Privaatrecht, KITLV Uitgeverij,Leiden*
- Djumialdji,FX. 1991 , *Perjanjian Pemborongan*, Reika Cipta Jakarta
- H.U.Adil S.s.,SHI.,MH ,*Dasar-dasar hukum Bisnis , edisi 2 Mitra Wacana Media*
- Henry P. Panggabean, 1999 , *Penyalahgunaan Keadaan, (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta.
- Herlien Budiono, 2006,*Asas keseimbangan bagi hukum perjanjian Indonesia : hukum perjanjian berlandaskan asas-asas, wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung .
- Hikmahato Juawana, Prof.Dr 2010 ,*Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional* , Lentera Hati
- Meriam Darus Badruzaman,Prof.Dr. SH ,*et al*, 2016 , *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Munir Fuady. 1998 ,*Kontrak Pemborongan Mega Proyek* ,:Citra Aditya Kartini,. Bandung
- Mohammad Amari, dan Asep Mulyana, 2010 “*Kontrak Kerja Konstruksi dalam Prespektif Tindak Pidana Korupsi*”, Aneka Ilmu
- Nasution. S, 1992 *Metode Penelitian Naturalistik – Kualitatif* , Tarsito – Bandung .
- R. Subekti, 1985 ,*Aneka Perjanjian* : Alumni, Bandung.
- Salim H.S. 2003,*Hukum Kontrak: Teori Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika
- Sudikno Mertokusumo, 1999 , *Mengenal Hukum* , Liberty, Yogyakarta.

B. Makalah Artikel

Agus Taufik Mulyono, 2015, *ERLEY WARNNING PRESERVASI JALAN NASIONAL*, Makalah yang disampaikan dalam *Work Shop* Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV di Bandung

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 11

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Jalan, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 96

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 134

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 64

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 04 Tahun 2015, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 5

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :07/PRT/M/2010 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1285.

Perturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 /PRT/M/2011 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 612

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 /PRT/M/2011 tentang Persyaratan teknis jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 900

Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dalam Peraturan LPJK nomor 10 Tahun 2013 Tentang Bidang Subbidang Pelasana Jasa Konstruksi.

Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : 08/SE/Db/2015 tentang Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Preservasi Jalan untuk Pemaketan Secara Long Segment.

Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : 09/SE/Db/2015 tentang Pelaksanaan Proses Pengadaan dan Pekerjaan Preservasi Jalan Secara Long Segment .

Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : 07/SE/Db/2016 tentang Perubahan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Preservasi Jalan dengan Skema Secara Long Segment untuk Tahun Tunggal.

Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 10/SE/Db/2014 tentang Penyampaian Standar Dokumen Pengadaan dan Spesifikasi Umum 2010 (Revisi 3) untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan.

Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : 07/SE/Db/2016 Bab X tentang Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : 08/SE/Db/2015 Bab IX Tentang Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)

D. Internet

<https://www.youtube.com/watch?v=1qut878pNZY> editorial Media Indonesia 22 juli 2013 diakses 20 Desember 2016

<http://www.pu.go.id/organisasi/ditjen-bina-marga> , diakses tanggal 20 Desember 2016

<https://www.pu.go.id/berita/1395/DITJEN-BINA-MARGA-BENTUK-48-TIM-UNTUK-PERBAIKAN-DARURAT-PANT> diakses tanggal 4 Desember 2016

<http://sispro.co.id/berita/kontrak-long-segment-gantikan-pbc-100133.htm>, diakses 8 Januari 2017

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e3b8693275c3/perbedaan-dan-persamaan-dari-persetujuan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak> diakses tanggal 10 Januari 2017